

Partai Buruh Sebut Penolakan Perpu Cipta Kerja Hanya Lip Service, Demokrat: Tidak Mewakili Buruh

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Irwan Fecho, menanggapi ucapan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, yang menyatakan penolakan terhadap Perpu Cipta Kerja yang dilakukan oleh partainya bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hanya sebatas lip service. Irwan balik menuding pernyataan Said itu tak mewakili kelompok buruh. Jadi pernyataan lip service itu adalah pernyataan politik dan tidak mewakili hati dan jiwa buruh. ujarnya saat dihubungi Tempo, Selasa, 7 Maret 2023. Irwan menyatakan rekam jejak Partai Demokrat sejak awal sudah jelas menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dia mengingatkan bahwa fraksinya melakukan walk out saat Rapat Paripurna pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020. Demokrat juga secara tegas menolak Perpu Cipta Kerja yang sedang digarap oleh DPR RI. "Rekam jejak secara konstitusional Demokrat sudah sangat jelas dan tegas sikapnya menolak dan walk out saat pengesahan UU Cipta kerja dan juga secara tegas menolak Perppu UU Ciptaker," kata dia. Demokrat siap menjadi saksi dalam JR UU Cipta Kerja. Irwan mengaku hingga saat ini belum ada komunikasi dari partai buruh perihal rencana pengajuan saksi fakta Judicial Review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi, jika nantinya Perpu Cipta Kerja disahkan menjadi UU oleh DPR. Namun dia memastikan Partai Demokrat secara tegas siap terlibat untuk berkontribusi melindungi rakyat Indonesia dengan memperbaiki produk legislasi. Sampai saat ini belum ada komunikasi dari pihak Partai Buruh untuk menjadi saksi fakta dalam judicial review Omnibus Law, namun Partai Demokrat selalu siap untuk terlibat dan memberikan kontribusi bagi produk legislasi yang berpihak dan melindungi kepentingan rakyat Indonesia. ujarnya. Selanjutnya, Said Iqbal sebut 2 partai yang menolak Perpu Cipta Kerja hanya Lip Service. Sebelumnya, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menegaskan partainya enggan berkoalisi dengan partai politik di parlemen khususnya partai yang pendukung Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dia menilai seluruh partai yang ada di parlemen saat ini mendukung undang-undang tersebut. Partai Buruh tidak akan melakukan koalisi atau aliansi apapun dengan partai politik yang ada. Kenapa? partai politik yang ada di parlemen itu

pro pada Omnibus Law. Partai buruh antitesisnya, ujarnya saat konferensi perempuan Partai Buruh pada 7 Maret 2023. Said menyebut dua partai yang menolak Omnibus Law, Demokrat dan PKS, hanya melakukan lip service lantaran hanya menolak saja dan kemungkinan tidak berkenan untuk diajukan menjadi saksi fakta judicial review oleh Partai Buruh. Walaupun ada dua partai politik yang menolak Omnibus Law ketika kami nanti minta jadi saksi fakta di Mahkamah Konstitusi dalam judicial review pasti enggak mau. Kita lihat lip service. ujarnya. Perpu Cipta Kerja kembali memicu polemik setelah Presiden Jokowi dinilai melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Alasan kegentingan memaksa yang diajukan Jokowi saat mengeluarkan perpu tersebut dianggap mengada-ada. Setelah itu, Perpu Cipta Kerja dianggap kedaluarsa karena gagal disahkan oleh DPR dalam masa sidang lalu. DPR baru membahas Perpu itu di tingkat Badan Legislasi (Baleg). Partai Demokrat dan PKS menolak untuk membawa perpu itu ke Rapat Paripurna. Pemerintah pun diminta untuk mencabut Perpu tersebut.